

Vol. 12 No. 1 (2024), Halaman 47-55



STRATEGI PERTAHANAN INDONESIA MELALUI PEMBANGUNAN POS LINTAS BATAS NEGARA (PLBN) ENTIKONG DALAM PERSPEKTIF GEOSTRATEGI

Tia Angelina^{1*}, Triesanto Romulo Simanjuntak², Suryo Sakti Hadiwijoyo³

¹²³Program Studi Hubungan Internasional Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia

Email: 372020069@student.uksw.edu^{1*}, triesanto.simanjuntak@uksw.edu², suryo.hadiwijoyo@uksw.edu³

Website Jurnal: <http://ejournal.unima.ac.id/index.php/jss>

 Akses dibawah lisensi CC BY-SA 4.0

<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

DOI:

(Diterima: 05-02-2024; Direvisi: 22-05-2024; Disetujui: 29-06-2024)

ABSTRACT

This research aims to examine Indonesia's defense strategy implemented through the construction of the Entikong National Border Post (PLBN), focusing on analysis from a geostrategy perspective. The research method used in this research is a qualitative analysis method, with data collection through literature study and analysis of official documents as well as interviews with the Head of the Entikong PLBN Management Division. This approach provides a comprehensive perspective on Indonesia's defense strategy in border areas. The research results show that the construction of the Cross-Border Post in Entikong is in line with Indonesia's national defense strategy which focuses on regional cooperation and resource management in border areas. In a geostrategic perspective, this research also highlights the importance of Entikong's geographical position as a strategic point that influences national defense. The defense strategy implemented through the Entikong Cross Border Post reflects adaptation to geopolitical dynamics in the region. This research contributes to further understanding of the implementation of Indonesia's defense strategy in a geostrategy context and can be a basis for the government and stakeholders to develop and improve national defense strategies in the future, especially in facing the changing geopolitical dynamics in this region.

Keywords: Border, Defense, Entikong, Geostrategy.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengkaji strategi pertahanan Indonesia yang diimplementasikan melalui pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong dengan berfokus pada analisis dalam perspektif geostrategi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis kualitatif, dengan pengumpulan data melalui studi literatur dan analisis pada dokumen resmi serta wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan PLBN Entikong. Pendekatan ini memberikan sudut pandang yang komprehensif terhadap strategi pertahanan Indonesia di wilayah perbatasan. Melalui penelitian ini didapatkan hasil yang menunjukkan bahwa pembangunan Pos Lintas Batas di Entikong sejalan dengan strategi pertahanan nasional Indonesia yang berfokus pada kerjasama regional dan pengelolaan sumber daya di wilayah perbatasan. PLBN dirancang untuk memantau dan mengamankan perbatasan, mencegah ancaman lintas batas, dan memperkuat kerjasama dengan negara tetangga. Dalam perspektif geostrategi, penelitian ini juga menyoroti pentingnya posisi geografis Entikong sebagai titik strategis yang memengaruhi pertahanan nasional. Strategi pertahanan yang diimplementasikan melalui Pos Lintas Batas Entikong mencerminkan adaptasi terhadap dinamika geopolitik di kawasan. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman lebih lanjut tentang implementasi strategi pertahanan

Indonesia dalam konteks geostrategi serta dapat menjadi dasar bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mengembangkan dan meningkatkan strategi pertahanan nasional di masa depan, khususnya dalam menghadapi dinamika geopolitik yang terus berubah di kawasan ini.

Kata Kunci: Entikong, Geostrategi, Perbatasan, Pertahanan.

PENDAHULUAN

Perbatasan merupakan kawasan yang penting dan strategis karena perbatasan merupakan jaminan sekaligus titik awal bagi keutuhan wilayah dan kedaulatan suatu negara (BNPP, 2018). Perbatasan juga merefleksikan beranda depan suatu negara yang secara langsung dapat dilihat oleh negara lain (Saiman, 2017). Indonesia berbatasan dengan 10 negara, antara lain Malaysia, Papua Nugini, Singapura, India, Vietnam, Timor Leste, Thailand, Republik Palau, dan Australia. Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur berbatasan langsung dengan Malaysia, dengan lima kabupaten di Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Malaysia: Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Kapuas Hulu.

Entikong merupakan sebuah kecamatan yang berada di Kabupaten Sanggau dan berbatasan langsung dengan Negara Bagian Serawak Malaysia Timur. Dari segi wilayah administratif Kecamatan Entikong mencakup 5 desa dan 28 dusun, 73 RT dengan luas wilayah 606,89 km (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2017 ; Kristi et al., 2018). Lima desa yang termasuk dalam wilayah administratif kecamatan Entikong yaitu desa Entikong, desa Semanget, desa Nekan, desa Pala Pasang, dan desa Suruh. Pembangunan wilayah Kalimantan masih menghadapi permasalahan yaitu belum optimalnya peran daerah perbatasan (BAPPENAS, 2020).

Dengan posisinya sebagai perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, berbagai aktivitas lintas batas terjadi di Entikong. Situasi ini merupakan peluang sekaligus tantangan bagi keamanan kawasan perbatasan karena Entikong menjadi tempat yang rawan terhadap terjadinya kejahatan-kejahatan lintas batas negara. Berbagai kejahatan lintas batas yang terjadi di Entikong yaitu *human trafficking*, narkoba, invasi nelayan asing dan penjualan gula ilegal (Polres Sanggau, 2018 ; Rahatmawati &

Wahyuni, 2012). Kasus-kasus *human trafficking* yang terjadi diperbatasan Entikong antara lain yaitu perdagangan orang (tenaga kerja), penipuan, pemindahan orang untuk tujuan-tujuan perbudakan, serta untuk dipekerjakan dengan tidak layak (Marhaeni Pudji Astuti, 2018 ; Kanwil Kalbar, 2023). Sementara itu penyelundupan narkoba biasanya dilakukan melalui jalan tikus yang terdapat di perbatasan Entikong. Berdasarkan data dari POLRES (Kepolisian Resor) Sanggau, tercatat bahwa di kecamatan Entikong terdapat sembilan jalur tidak resmi yang dikenal sebagai jalan tikus yaitu terletak pada : (1). PLBN Entikong; (2). Sisi sebelah kanan PLBN Entikong; (3). Sisi sebelah kiri PLBN Entikong; (4). Peripin; (5). Gun Tembawang; (6). Suruh Tembawang; (7). Pala Pasang; (8). Mangkau; dan (9). Panga (Elyta, 2020).

Dalam konteks pertahanan dan keamanan, keberadaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) menjadi manifestasi kedaulatan negara di wilayah perbatasan. PLBN memiliki fungsi primer yaitu *Custom* (Bea dan Cukai), *Imigration* (Imigrasi), *Quarantine* (Karantina), dan *Security* (Keamanan) yang juga disingkat sebagai CIQS (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2017 ; Strategi et al., 2021). Pertahanan kawasan perbatasan sejalan dengan fungsi *security* (keamanan) dari PLBN. Dalam Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024 ditetapkan 222 (dua ratus dua puluh dua) lokasi prioritas pada 54 (lima puluh empat) kabupaten/kota di 15 (lima belas) provinsi Indonesia dimana Entikong merupakan salah satu lokasi prioritas pada kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat. Kehadiran Ibukota Negara Indonesia di Kalimantan menjadi peluang sekaligus tantangan bagi wilayah Kalimantan, terutama kawasan perbatasan. Oleh karena itu strategi pertahanan di kawasan perbatasan seperti wilayah Entikong menjadi penting untuk ditingkatkan mengingat wilayah ini berbatasan langsung dengan Malaysia.

Strategi pertahanan di wilayah perbatasan melalui pembangunan PLBN Entikong merupakan implementasi dari geostrategi Indonesia. Geostrategi merupakan sub kajian dari geopolitik yang berkaitan dengan strategi sehingga sebelum membahas geostrategi diperlukan pemahaman yang tepat terkait geopolitik terlebih dahulu. Geopolitik didefinisikan sebagai suatu kajian yang menggunakan konstelasi ruang untuk kepentingan politik suatu negara. Sedangkan geostrategi adalah arah geografis kebijakan luar negeri suatu negara yang dituangkan dalam Langkah langkah kebijakan dengan memproyeksikan kekuatan militer dan mengarahkan diplomasi politik. Variabel utama yang memengaruhi geostrategi adalah batas negara. Negara-negara akan berupaya seoptimal mungkin untuk melindungi wilayah mereka dari potensi invasi dan serangan, dan stabilitas batas negara menjadi indikator penting untuk keamanan teritorial. Ketika batas negara menghadapi ancaman atau tidak stabil, negara akan berfokus pada upaya menjaga keamanan teritorialnya ([Priyono & Yusgiantoro, 2017](#)).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral ([Raco, 2010](#)). Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi alami obyek dimana peneliti berperan sebagai instrument kunci ([Sugiyono, 2014](#)). Sementara itu Moleong mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya ([Moleong, 2018](#)).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder bersumber dari hasil studi literatur review serta wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Bidang Pengelolaan PLBN Entikong (Bapak Viktorius Dunand, S.E, M.Si.). Teknis analisis data dilakukan melalui empat tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, triangulasi dan penarikan kesimpulan sesuai dengan teknik analisa data ([Miles & Huberman 1994](#)).

HASIL DAN PEMBAHASAN

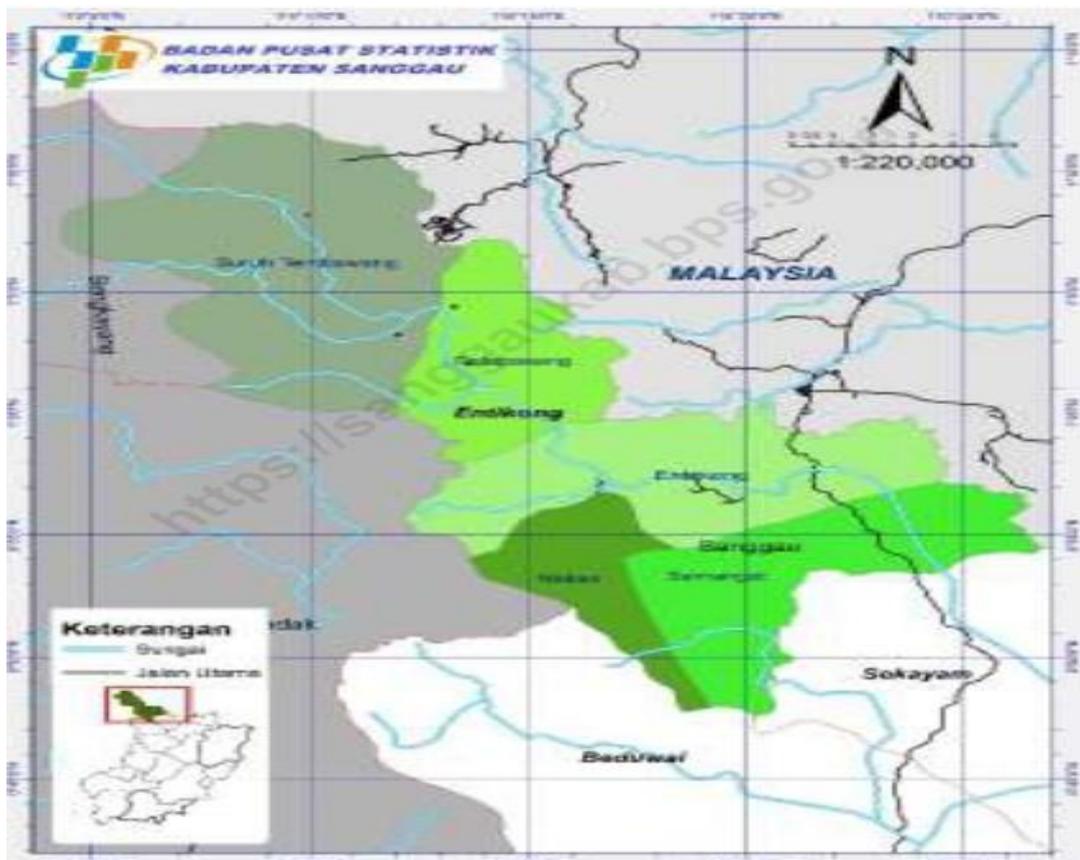
Kecamatan Entikong merupakan salah satu dari 15 kecamatan di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat yang secara langsung berbatasan dengan Negara Bagian Serawak Malaysia Timur ([Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau, 2020](#)). Secara keseluruhan wilayah Kalimantan berbatasan langsung dengan Malaysia sepanjang 2.004 km. Dari sisi topografi wilayah Entikong merupakan kawasan yang terdiri dari 60% perbukitan dan 40% wilayah dataran. Kecamatan Entikong memiliki luas wilayah sekitar 506,89 Km² dan terletak sekitar 145 KM dari Ibukota Kabupaten Sanggau ([Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau, 2020](#)). Secara administratif, kecamatan Entikong sebelah utara berbatasan dengan Malaysia Timur, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sekayam, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bengkayang dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Landak ([Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau, 2020](#)). Dari data pintu keluar masuk perbatasan antara Kalimantan Barat-Indonesia dengan Serawak Malaysia dapat dilihat bahwa Entikong yang berbatasan dengan Tebedu merupakan salah satu pintu akses keluar masuk antara Indonesia dan Malaysia. Oleh karena itu pembangunan Pos Lintas Batas Negara menjadi penting untuk menjadi pagar di kawasan perbatasan serta sebagai suatu strategi pertahanan Indonesia. Saat ini di sepanjang kawasan perbatasan antara Kalimantan Barat, Indonesia dengan Serawak, Malaysia telah dibangun 5 (lima) Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yaitu PLBN Aruk, PLBN Badau, PLBN Entikong, PLBN Jagoi Babang, dan PLBN Sei Kelik ([Badan Pengelola Perbatasan Daerah \(BPPD\) Provinsi Kalimantan Barat, 2020](#)).

Entikong mempunyai jalur perbatasan darat dengan wilayah Serawak, Malaysia yang sering disebut sebagai jalur sutera karena dapat dilewati secara langsung menggunakan transportasi darat tanpa harus menyebrang sungai atau laut ([Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2017](#)). Jalur perbatasan Entikong ini menjadi jalur yang sering dilalui oleh TKI yang berasal dari Jawa ataupun Sumatera ([Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia](#)

[Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2017](#)).

Keberadaan Entikong di kawasan perbatasan menciptakan tingginya volume kegiatan lalu lintas penduduk yang masuk dan keluar wilayah Indonesia melalui Entikong. Berdasarkan data Kantor Imigrasi Kelas II Entikong, tercatat 11 ribu orang melintasi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong menuju Malaysia serta 5.000 orang pelintas yang masuk ke Indonesia pada 18 hingga 25 April 2023 ([PEMKAB SANGGAU, 2023](#)). Selain itu berdasarkan data PLBN Entikong tercatat bahwa jumlah keseluruhan pelintas yang melewati PLBN Entikong mulai

Januari hingga Desember 2023 mencapai 291.727 orang ([PLBN Entikong, 2023](#)). Situasi ini membuat kawasan Entikong rawan akan kasus kejahatan lintas batas. Kawasan perbatasan merupakan wilayah yang potensial dan memiliki resiko paling besar untuk terjadinya kasus kejahatan lintas batas. Kompleksitas dari perkembangan kejahatan lintas batas negara didorong oleh beberapa faktor yaitu globalisasi, migrasi atau pergerakan manusia, serta perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi yang pesat yang berpotensi mengganggu kedaulatan negara ([Purwono, 2014](#)).



Gambar 1.
Peta Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat

Buku Putih Pertahanan Indonesia mencatat program implementasi rencana aksi ASEAN dalam memerangi kejahatan lintas negara (*Programme to Implement the ASEAN Plan of Combat Transnational Crime*) memaparkan bahwa di kawasan ASEAN ditemukan beberapa jenis kejahatan lintas negara seperti perdagangan manusia, perdagangan gelap narkoba, penyelundupan senjata, pencucian

uang, terorisme, perompakan laut, kejahatan perbankan internasional dan kejahatan siber ([Kementerian Pertahanan RI, 2015](#)). Berdasarkan klasifikasi berbagai jenis tindakan kejahatan lintas negara tersebut, yang terjadi di kawasan perbatasan Entikong adalah perdagangan orang dan perdagangan narkoba ([Elyta, 2020; Marhaeni Pudji Astuti, 2018](#)).

Tabel 1. Pintu Keluar Masuk Perbatasan dan Batas Akses Terjauh ke Wilayah Kalimantan Barat dan Sarawak-Malaysia

Kalimantan Barat, Indonesia		Sarawak, Malaysia	
<i>Exit/Entry Point</i>	<i>Area of Access</i>	<i>Exit/Entry Point</i>	<i>Area of Acces</i>
Temajuk, Liku	<i>Limited to Paloh and Liku only</i>	Sematan	<i>Limited to Sematan Bazaar only</i>
Sajingan, Aruk	<i>Limited to Sajingan Besar only</i>	Biawak	<i>Limited to 5 Km radius of Biawak Bazaar only</i>
Jagoi Babang	<i>Limited to Seluas only</i>	Serikin	<i>Limited to Sirikin only</i>
Siding	<i>Limited to Seluas only</i>	Stass	<i>Limited 5 Km radius of Stass only</i>
Saparan	<i>Limited to 5 Km radius of Saparan only</i>	Simpang Empat	<i>Limited to 5 Km radius to Simpang Empat only</i>
Entikong	<i>Limited to 5 Km radius to Entikong only</i>	Tebedu	<i>Limited to 5 Km radius of Tebedu only</i>
Segumon	<i>Limited to 10 Km</i>	Bunan Gega	<i>Limited to 10 Km</i>
Bantan	<i>Radius of Segumon and Bantan only</i>		<i>Radius of Bunan Gega Bazaar only</i>
Jasa Nanga Bayan	<i>Limited to Senaning only</i>	Karanggas Gayau	<i>Limited to Karanggas Gayau Bazaar only</i>
Semareh	<i>Limited to 5 Km radius of Semareh only</i>	Karanggas Gayau	<i>Limited to Karanggas Gayau Bazaar only</i>
Merangkai Panjang Lengau	<i>Limited to Puring Kencana only</i>	Batu Lintang	<i>Limited to Batu Lintang Bazaar only</i>
Nanga Badau	<i>Limited to Badau only</i>	Lubok Antu	<i>Limited to Lubok Antu only</i>

Sumber: [Arifin \(2014:163\) dalam \(Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2017\).](#)

Jalur perbatasan Entikong mempunyai beberapa jalan tikus kerap kali dimanfaatkan sebagai berbagai aktivitas penyelundupan, dari penyelundupan barang, obat-obatan terlarang, narkoba, hingga penyelundupan manusia. Berdasarkan data PLBN Entikong, pada tahun 2020 terdapat 2 kasus penyelundupan manusia dan 1 kasus penyelundupan narkoba yang berhasil ditangani oleh Kepolisian Entikong yang bekerja sama dengan Angkatan Tentara Malaysia ([PLBN Entikong, 2020](#)). Berbagai aktivitas penyelundupan barang, manusia, dan narkoba tersebut di wilayah lintas batas negara seperti Entikong merupakan ancaman keamanan transnasional yang menjadi salah satu permasalahan dan tantangan yang merupakan isu strategis dalam Rencana Strategis Kementerian Pertahanan Tahun 2020-2024 ([Kemhan, 2020](#)). Buku Putih Pertahanan juga menyatakan bahwa peredaran dan penyalahgunaan narkoba termasuk dalam ancaman nyata yang merupakan bentuk ancaman yang menjadi prioritas dalam penanganannya karena dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan

keselamatan segenap bangsa ([Kementerian Pertahanan RI, 2015](#)). Oleh karena itu diperlukan strategi pertahanan untuk mengatasi tantangan dan ancaman di kawasan lintas batas negara.

Secara operasional PLBN memiliki dua fungsi utama yaitu fungsi primer dan fungsi sekunder. Fungsi primer dari PLBN terdiri dari fungsi CIQS (*Customs, Immigration, Quarantine, Security*). Sementara itu fungsi sekunder dari PLBN adalah untuk pengembangan kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya ([Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri Kementerian Luar Negeri, 2021](#)). Dalam fungsi primernya, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) menjadi tempat bagaimana negara melakukan kontrol terhadap keluar dan masuk barang dan orang dari dari luar atau dari dalam wilayah teritorial negara, sehingga menyangkut di dalamnya persoalan keamanan dan prosedur imigrasi yang mencakup perlintasan manusia serta berkaitan dengan bea cukai yang berhubungan dengan perlintasan barang untuk meminimalisir resiko barang atau penumpang

yang datang dan masuk ke wilayah suatu negara ([BNPP, 2018](#)).

Berkaitan dengan fungsi perbatasan, pertahanan kawasan perbatasan sejalan dengan fungsi *security* (keamanan) dari PLBN. Wilayah perbatasan setidaknya memiliki tujuh jenis fungsi utama yaitu fungsi militer-strategis, fungsi ekonomis, fungsi konstitutif, fungsi identitas nasional, fungsi persatuan nasional, fungsi pembangunan negara-bangsa, dan fungsi pencapaian kepentingan domestik ([Hadiwijoyo, 2009](#)). Dalam konteks ini fungsi militer-strategis dan fungsi pencapaian kepentingan domestik berkaitan erat dengan strategi pertahanan dimana dalam fungsi militer-strategis perbatasan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan militer-strategis suatu negara, terutama pembangunan sistem pertahanan darat, laut, dan udara untuk menjaga diri dari ancaman eksternal ([Hadiwijoyo, 2009](#)). Sementara fungsi pencapaian domestik menyatakan bahwa perbatasan berfungsi untuk memberikan batas geografis bagi upaya negara untuk mencapai kepentingan nasional di bidang politik, sosial, ekonomi pendidikan, pembangunan, infrastruktur laut, konservasi energi laut, dan sebagainya ([Hadiwijoyo, 2009](#)). Keterkaitan strategi pertahanan dengan kepentingan nasional terletak pada titik dimana untuk mencapai kepentingan nasional suatu negara yang berkaitan dengan perlindungan identitas fisik dalam konteks keutuhan wilayah teritorialnya maka diperlukan strategi pertahanan.

Rencana Strategis Kementerian Pertahanan Tahun 2020-2024 menyatakan bahwa salah satu dari sembilan prioritas nasional bidang pertahanan negara adalah pembangunan wilayah perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar/Terdepan (PPKT) ([Kemhan, 2020](#)). Dalam strategi untuk mencapai sasaran pembangunan wilayah perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil terluar/terdepan (PPKT) Kementerian Pertahanan melakukan beberapa hal yaitu: menindaklanjuti pembangunan sabuk pengaman di kawasan perbatasan darat Kalimantan; meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga khususnya BNPP dan Pemda dalam pengelolaan daerah prioritas pertahanan di seluruh kawasan perbatasan darat khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur dan Papua berbasis tata ruang; mengoptimalkan pembangunan kekuatan TNI di kawasan pulau-

pulau strategis terluar/terdepan; serta mendukung penguatan fungsi dan kewenangan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebagai pemegang otoritas pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan, dan tim koordinasi pengelolaan PPKT yang diketuai oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan sebagai pemegang otoritas pengelolaan PPKT agar mampu mengkoordinasikan, mengintegrasikan, dan mensinergikan program pembangunan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga terkait dan Pemda dengan mengacu pada rencana induk pengelolaan perbatasan negara.

Melalui Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024 telah ditetapkan 222 (dua ratus dua puluh dua) lokasi prioritas pada 54 (lima puluh empat) kabupaten/kota di 15 (lima belas) provinsi Indonesia dimana Entikong merupakan salah satu lokasi prioritas pada kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat ([Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2022, 2022](#)). Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Pertahanan pembangunan sabuk pengaman di kawasan perbatasan Kalimantan merupakan strategi untuk mencapai sasaran pembangunan wilayah perbatasan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan. Dalam pembangunan sarana dan pra-sarana pertahanan di perbatasan, Kemhan melakukan pembangunan Jalur Inspeksi dan Patroli Perbatasan (JIPP) sepanjang 621,09 km serta pembangunan dermaga TNI AL Sei Pancang Pulau Sebatik, Nunukan yang dilakukan untuk mendukung keamanan laut. Selain itu dalam upaya pertahanan udara Kemhan melakukan pembangunan untuk meningkatkan fasilitas Landasan Udara di Pontianak dan Tarakan serta membangun Landasan Udara Tipe C di Kabupaten Sambas ([Kementerian Pertahanan, 2016](#)).

Kawasan perbatasan memiliki peran dan kedudukan strategis dalam rangka mempertahankan eksistensi bangsa dan negara ([Rani, 2012](#)). Dalam konteks ini perbatasan merupakan salah satu elemen penunjang dalam sistem pertahanan negara karena perbatasan merupakan kunci utama dari kedaulatan suatu negara ([Firdaus, 2019](#)). Terkait dengan hal tersebut maka penelitian dari Yusa Djuyandi

dkk (2023) mengatakan bahwa dimensi pertahanan suatu negara bukan hanya terletak pada kekuatan militer dalam menjaga wilayahnya saja namun juga ditentukan oleh kekuatan yang bersifat non militer dengan pendekatan *soft power*. Konsep pertahanan melalui pendekatan *soft power* melihat bahwa kekuatan negara tidak hanya terletak pada kemampuan militernya saja, namun juga terletak pada kekuatan budaya, sistem politik, ideologi, pendidikan, daya saing ekonomi dan keterbukaan informasi bagi masyarakat (Wang & Lu, 2008). Penelitian ini memperkuat penelitian yang telah ada sebelumnya meskipun ada perbedaan dimana peneliti melihat strategi pertahanan dari penguatan peran PLBN sebagai aspek pertahanan di kawasan perbatasan.

Strategi pertahanan mengandung tiga substansi dasar yaitu apa yang dipertahankan, bagaimana cara mempertahankan dan dengan apa mempertahankan yang diuraikan dalam bentuk tujuan dan sasaran, cara mencapai sasaran dan sumber daya yang digunakan (Kementrian Pertahanan RI, 2015). Tujuan dan sasaran pertahanan Indonesia yaitu: terjaganya kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI dan terlindunginya seluruh bangsa dari segala bentuk ancaman; terbentuknya Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) yang terintegrasi dan modern; terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk pertahanan negara; serta terselenggaranya pengelolaan wilayah pertahanan (Kemhan, 2020). Cara mencapai tujuan dan sasaran tersebut yaitu melalui pembangunan postur TNI, pembangunan pertahanan dan intelijen siber, pemberdayaan industry pertahanan, pembangunan karakter bangsa, pembangunan wilayah perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT), peningkatan kerjasama internasional dan pembangunan kelembagaan (Kemhan, 2020).

Strategi pertahanan juga bersinggungan erat satu sama lain dengan kepentingan nasional dalam upaya menjamin keutuhan dan kedaulatan wilayah, pertahanan dan keamanan nasional serta meningkatkan kesejahteraan rakyat di wilayah perbatasan. Kepentingan nasional menurut Morgenthau (1954) memiliki tiga (3) dimensi yaitu identitas fisik, identitas politik, dan identitas kultural. Identitas fisik mengacu pada karakteristik fisik berupa letak geografis, ukuran wilayah, kondisi iklim, dan sumber daya alam suatu negara (Morgenthau,

1954). Kawasan perbatasan bernilai strategis bagi kepentingan nasional Indonesia yang mencakup aspek politik, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Pada kawasan perbatasan kepentingan nasional dirumuskan melalui strategi pertahanan negara untuk mengatasi berbagai ancaman yang mengancam kedaulatan negara.

Strategi pertahanan memiliki keterkaitan dengan geostrategi karena letak geografis Indonesia sebagai suatu negara kepulauan dan negara maritim yang berada diantara dua benua dan dua samudra menjadi dasar penyusunan strategi pertahanan Indonesia. Geostrategi merupakan bagian dari geopolitik sehingga ketika membahas geostrategi tentunya tidak akan terlepas dari geopolitik. Secara umum geostrategi didefinisikan sebagai arah geografis kebijakan luar negeri suatu negara, memiliki karakter agresif, ofensif, dan *outward-looking* dimana geostrategi memadukan antara pertimbangan strategi dengan geopolitik dan melibatkan peran militer didalamnya (Priyono & Yusgiantoro, 2017). Geostrategi Indonesia direalisasikan melalui upaya mencapai Ketahanan Nasional, yang menggambarkan situasi dinamis sebuah bangsa yang memiliki ketahanan dan keuletan, serta memiliki kemampuan untuk memperkuat kekuatan nasionalnya dalam menghadapi serta mengatasi segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri yang bertujuan untuk melindungi integritas, identitas, kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara, serta menjaga tekad bangsa dalam mencapai tujuan nasional (Kemhan, 2020).

Pembangunan kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar difokuskan pada usaha pengembangan kawasan perbatasan negara dengan menggunakan pendekatan pada aspek pertahanan dan keamanan negara, aspek kesejahteraan, dan aspek lingkungan hidup (BAPPENAS, 2020). Kehadiran PLBN Entikong ini menjadi salah satu bentuk strategi pertahanan pemerintah dengan berbasis pada aspek geografi yaitu wilayah perbatasan sebagai wilayah terluar Indonesia. Pembangunan PLBN ibarat membangun pagar untuk menjaga “rumah” negara. Suatu rumah akan rawan menjadi incaran pencuri jika tidak memiliki pagar, begitu juga negara. Jika negara tidak memiliki pagar di kawasan sekeliling negara itu, maka tingkat kejahatan akan

semakin tinggi di kawasan tersebut. Pembangunan berbagai infrastruktur seperti pos-pos penjagaan disekitar PLBN Entikong ini menjadi pagar bagi kawasan perbatasan tersebut.

KESIMPULAN

Keberadaan Pos Lintas Batas Negara Entikong memiliki peran strategis dalam mengamankan kepentingan nasional Indonesia, terutama terkait dengan aspek pertahanan dan keamanan di perbatasan. Melalui perspektif geostrategi, Pos Lintas Batas Negara Entikong ditempatkan sebagai elemen kunci dalam rangkaian strategi pertahanan nasional. Lokasinya yang strategis di perbatasan dengan negara tetangga membuatnya menjadi posisi yang vital untuk mengelola dan mengawasi arus lintas batas, mencegah potensi ancaman keamanan, dan memastikan stabilitas wilayah tersebut.

Penerapan teori kepentingan nasional menjadi landasan utama dalam merumuskan strategi pertahanan, di mana upaya pembangunan Pos Lintas Batas Negara Entikong diarahkan untuk melindungi kepentingan vital Indonesia. Keberhasilan implementasi strategi ini akan memberikan kontribusi positif terhadap kestabilan regional dan menjaga integritas nasional. Namun demikian, perlu diakui bahwa tantangan dan dinamika geostrategis selalu berkembang, dan perlu adanya adaptasi terus-menerus terhadap perubahan lingkungan keamanan. Oleh karena itu, pemeliharaan dan peningkatan kapabilitas Pos Lintas Batas Negara Entikong, serta kerja sama dengan negara tetangga dan pihak terkait, menjadi krusial dalam menjaga efektivitas strategi pertahanan nasional.

SARAN

Beberapa saran yang dapat penulis berikan yaitu: pertama, penguatan kerja sama regional. Pemerintah Indonesia dapat berupaya untuk lebih mengintensifkan kerja sama regional dengan negara-negara tetangga, terutama yang berbagi perbatasan dengan Pos Lintas Batas Negara Entikong. Kedua, peningkatan kapabilitas pos lintas batas: Perlu dilakukan peningkatan kapabilitas dan infrastruktur Pos Lintas Batas Negara Entikong agar mampu mengatasi berbagai ancaman yang mungkin timbul. Ini termasuk peningkatan teknologi pemantauan, peralatan keamanan, dan pelatihan

personel untuk memastikan kesiapan dalam menghadapi situasi darurat. Ketiga, pengembangan sumber daya manusia: Penting untuk mengembangkan sumber daya manusia yang terlibat dalam operasional Pos Lintas Batas. Ini melibatkan pelatihan yang berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan personel dalam deteksi dini, manajemen krisis, dan diplomasi keamanan. Ketiga, penelitian lanjutan: Dibutuhkan penelitian lebih lanjut mengenai perkembangan dinamika geostrategis di kawasan, termasuk perkembangan politik, ekonomi, dan keamanan global yang mungkin mempengaruhi strategi pertahanan Indonesia. Hal ini akan membantu dalam memastikan bahwa strategi yang diadopsi tetap relevan dan efektif seiring berjalannya waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi Kalimantan Barat. 2020. *Pos Lintas Batas Negara*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau. 2020. *Kecamatan Entikong Dalam Angka*. BPS Kabupaten Sanggau.
- BAPPENAS. 2020. *LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL 2020-2024 Narasi REPUBLIK INDONESIA*.
- BNPP. 2018. *INFORMASI UMUM TENTANG POS LINTAS BATAS NEGARA (PLBN)*.
- Djuyandi, Y., Husin, L. H., Mustofa, M. U., & Iriansyah, M. N. 2023. *PENGUATAN MASYARAKAT DI WILAYAH PERBATASAN SEBAGAI BENTUK PERTAHANAN NEGARA: PENGALAMAN DARI KECAMATAN ENTIKONG, KALIMANTAN BARAT*. *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat*, 12.
- Elyta. 2020. *Penyelundupan Narkoba di Perbatasan Entikong Indonesia dan Malaysia*. *Andalas Journal of International Studies (AJIS)*, 9(2), 100. <https://doi.org/10.25077/ajis.9.2.100-115.2020>

- Firdaus, F. 2019. Dampak kebijakan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk di Desa Sebunga Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 109. <https://doi.org/10.14710/jiip.v3i2.3881>
- Hadiwijoyo, S. S. 2009. *Batas Wilayah Negara Indonesia: Dimensi, Permasalahan dan Strategi Penanganan (Suatu Tinjauan Empiris dan Yuridis)*. Gava Media.
- Kementerian Pertahanan. 2016. *Penguatan Keamanan Laut dan Daerah Perbatasan, Prioritas Kerja Kementerian Pertahanan*. <https://www.kemhan.go.id/2016/10/27/penguatan-keamanan-laut-dan-daerah-perbatasan-prioritas-kerja-kementerian-pertahanan.html>
- Kementerian Pertahanan RI. 2015. *BUKU PUTIH PERTAHANAN INDONESIA (Cetakan Ketiga)*. Kementerian Pertahanan RI.
- Kemhan. 2020. *RENSTRA UO KEMHAN 2020-2024*.
- Kominfo. 2015. *NAWACITA: 9 Program Perubahan Untuk Indonesia*.
- Marhaeni Pudji Astuti, T. 2018. Trafficking di Pos Lintas Batas Entikong-Tebedu Kasus di Perbatasan Indonesia dengan Malaysia. *Forum Ilmu Sosial*.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. 1994. *Qualitative Data Analysis*. SAGE Publications.
- Moleong, L. J. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Morgenthau, H. J. 1954. *Politics Among Nations : The Struggle for Power and Peace* (2nd ed.). A. A. Knopf.
- PLBN Entikong. 2020. *Data Kejahatan di Kawasan Perbatasan Entikong 2020*.
- PLBN Entikong. 2023. *Data Pelintas Batas PLBN Entikong*.
- Presiden RI. 2020. *PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2020-2024*.
- Priyono, J., & Yusgiantoro, P. 2017. *Geopolitik, Geostrategi, Geoekonomi*. Universitas Pertahanan (Unhan) Press.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2017. *Pembangunan Pelabuhan Daratan (Dry Port) di Entikong Kalimantan Barat*.
- Saiman. 2017. Kepentingan Pemerintah Pusat Dalam Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Sospol*, 3(1), 142–161.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.